



## Mengapa Investor Tidak Begitu Tertarik Berinvestasi di Aceh?

### Description

## Pendahuluan

Aceh sering dipuji sebagai daerah berlimpah sumber daya alam – mulai dari hasil **pertanian**, **perkebunan**, **pertambangan**, hingga kekayaan laut dan potensi energi. Namun ironisnya, potensi besar ini belum tergarap optimal sehingga belum berhasil mendorong perekonomian rakyat Aceh<sup>[1]</sup>. Provinsi Aceh masih menghadapi tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatra dan tingkat pengangguran yang mencemaskan<sup>[2]</sup>. Padahal, dari sektor minyak dan gas (migas) hingga belanja pemerintah, Aceh mendapatkan pemasukan yang cukup besar. Ketergantungan pada migas dan dana pemerintah tanpa diversifikasi ekonomi membuat ekonomi Aceh rentan guncangan eksternal<sup>[3]</sup>.

Dari sisi investasi, data menunjukkan Aceh tertinggal jauh dibanding provinsi lain. Realisasi investasi Aceh, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), merupakan yang **paling rendah di Sumatra**<sup>[4]</sup>. Sebagai gambaran, total investasi di Aceh Triwulan I 2024 sekitar Rp2,36 triliun (PMDN + PMA), meningkat dari tahun sebelumnya, namun masih sangat kecil jika dibanding Sumatera Utara yang mencapai Rp22 triliun pada 2023 atau Riau Rp78 triliun<sup>[4]</sup>. Kinerja investasi Aceh yang tertinggal ini menimbulkan pertanyaan: **mengapa investor enggan menanam modal di Aceh?** Apa saja faktor yang membuat **iklim investasi Aceh** kurang menarik?

Berikut ini adalah beberapa **alasan utama** yang diidentifikasi dari berbagai analisis terbaru (2024–2025), pendapat akademisi, pelaku ekonomi lokal, hingga pejabat terkait:

- **Birokrasi Perizinan yang Rumit dan Lambat:** Prosedur investasi di Aceh terkenal berbelit-belit, dengan proses perizinan yang panjang dan kurang transparan.
- **Ketidakpastian Regulasi dan Kebijakan:** Sering terjadinya perubahan aturan di tingkat lokal tanpa sosialisasi memadai membuat investor ragu.
- **Keterbatasan Infrastruktur:** Minimnya infrastruktur dasar seperti pelabuhan, jalan, listrik, dan fasilitas pendukung bisnis menghambat investasi baru.
- **Kepastian Hukum Rendah:** Sengketa lahan, tumpang tindih aturan pusat-daerah, dan perlindungan investor yang lemah menimbulkan risiko tinggi.

- **Tata Kelola Lemah dan Praktik Korupsi:** Manajemen pemerintahan yang kurang efektif serta adanya korupsi mencederai kepercayaan investor.
- **Minimnya Diversifikasi Ekonomi dan SDM Terampil:** Ekonomi Aceh masih bertumpu pada migas dan belanja pemerintah; industri hilir dan kualitas tenaga kerja lokal belum berkembang baik.
- **Tantangan Sosial Budaya (Penerapan Syariat):** Aceh memiliki kekhasan budaya dan aturan syariat Islam yang memerlukan penyesuaian bagi investor, terutama di sektor pariwisata, sehingga sebagian investor asing bersikap hati-hati.

Selanjutnya, kita akan membahas setiap faktor penghambat **investasi di Aceh** tersebut secara lebih mendalam, didukung data terbaru, kutipan pandangan pakar, serta contoh kasus yang relevan.

## Birokrasi Perizinan yang Berbelit dan Lambat

Salah satu hambatan paling klasik dan krusial bagi investor di Aceh adalah **birokrasi**. Berbagai sumber menggarisbawahi bahwa prosedur perizinan usaha di Aceh masih **rumit, panjang, dan tumpang tindih**<sup>[5]</sup>. Proses memperoleh izin usaha sering memerlukan langkah birokrasi di banyak instansi, baik tingkat daerah maupun pusat, yang tidak terkoordinasi dengan baik. Alur perizinan yang berbelit ini membuat investor menghabiskan waktu dan biaya ekstra sebelum proyek bisa berjalan.

Untuk gambaran skala masalah, menurut laporan *Ease of Doing Business* Bank Dunia, rata-rata waktu pengurusan izin usaha di Indonesia mencapai 62,5 hari – jauh lebih lama dibanding negara tetangga seperti Singapura yang hanya butuh sekitar 3 hari<sup>[6]</sup>. Kondisi di Aceh bisa lebih kompleks lagi; kerap terjadi prosedur perizinan **tumpang tindih antara pemerintah daerah dan pusat**<sup>[6]</sup>. Artinya, investor harus memperoleh berbagai rekomendasi dan izin dari pemerintah Aceh sekaligus persetujuan dari kementerian di Jakarta, yang tentu memperpanjang birokrasi.

Bukti konkret rumitnya birokrasi Aceh tercermin dari pernyataan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Aceh, Safuadi. Ia mengungkapkan bahwa **perizinan yang lambat dan tidak transparan** merupakan salah satu faktor penghambat utama ekonomi Aceh<sup>[7]</sup>. Hal senada dikemukakan dalam analisis lokal: “*Birokrasi yang rumit dan lambat*” disebut sebagai tantangan terbesar investasi di Aceh<sup>[8]</sup>. Prosedur yang panjang dan berbelit ini membuat investor enggan, karena setiap penundaan berarti biaya operasional yang terus berjalan tanpa kepastian kapan usaha bisa mulai.

Kabar baiknya, upaya perbaikan mulai terlihat. Pemerintah telah mendirikan **Mal Pelayanan Publik (MPP)** di Banda Aceh dan beberapa kabupaten untuk menyederhanakan layanan perizinan menjadi satu atap. Contohnya di Aceh Besar, pejabat Muhammad Iswanto berhasil memangkas birokrasi perizinan melalui MPP, hingga Dinas PTSP Aceh Besar masuk peringkat 70 nasional dari 415 kabupaten dalam kinerja pelayanan perizinan<sup>[9]</sup>. Langkah-langkah reformasi birokrasi seperti ini diharapkan terus diperluas di seluruh Aceh. **Tanpa perizinan yang cepat, transparan, dan efisien, investor akan terus ragu** untuk masuk Aceh<sup>[10]</sup>. Reformasi birokrasi yang mendasar menjadi prasyarat untuk meningkatkan daya saing investasi di Aceh.

## Ketidakpastian Regulasi dan Kebijakan Daerah

Selain birokrasi, **stabilitas regulasi** juga menjadi pertimbangan utama investor. Di Aceh, sayangnya, iklim regulasi kerap berubah-ubah dan menimbulkan ketidakpastian. Banyak investor mengeluhkan aturan yang **sering berganti tanpa sosialisasi memadai**<sup>[11]</sup>. Perubahan mendadak pada kebijakan daerah – misalnya terkait perizinan lahan, pajak daerah, atau aturan sektor tertentu – dapat mengganggu rencana bisnis jangka panjang.

Sebagai contoh, dalam sektor pertambangan Aceh pernah terjadi perubahan kebijakan eksploitasi sumber daya alam secara tiba-tiba, yang mengejutkan investor dan menambah beban mereka<sup>[11]</sup>. Ombudsman RI mencatat pada 2019 bahwa pelaku usaha di Aceh resah karena kebijakan pemerintah daerah kerap berubah-ubah, sehingga menyulitkan penyusunan rencana investasi jangka panjang<sup>[12]</sup>. Misalnya, aturan tata guna lahan perkebunan yang dapat sewaktu-waktu direvisi untuk keperluan berbeda menimbulkan ketidakpastian bagi investor agribisnis.

Dampak dari **ketidakpastian kebijakan** ini ditegaskan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia. Laporan APINDO tahun 2020 menunjukkan banyak pengusaha **takut berinvestasi lebih jauh di Aceh** karena khawatir perubahan regulasi di tengah jalan akan merugikan mereka<sup>[13]</sup>. Ketakutan ini bukan tanpa alasan – investor bisa saja sudah menanam modal besar, tetapi kemudian aturan main berubah (misalnya perubahan tarif pajak daerah atau pencabutan izin tambang secara sepihak), yang membuat investasi mereka terancam.

Pendapat para pakar lokal pun sejalan. Akademisi Dr. M. Adli Abdullah dalam sebuah diskusi “Aceh Aman tapi Tak Nyaman?” mengungkapkan bahwa *ketidakpastian regulasi* merupakan salah satu penghambat utama investasi di Aceh<sup>[14]</sup>. Meskipun Aceh sudah damai secara politik sejak 2005, kepastian hukum dan regulasi ekonomi tampaknya belum stabil. Investor sangat memperhitungkan konsistensi kebijakan daerah sebelum menanam modal jangka panjang.

Untuk mengatasi hal ini, **konsistensi dan sinkronisasi kebijakan pusat-daerah** mutlak diperlukan. Pemerintah Aceh perlu menyusun regulasi investasi yang transparan dan **tidak berubah-ubah**, atau setidaknya memberikan masa transisi dan komunikasi yang cukup setiap ada penyesuaian aturan. Kepastian hukum dalam hal perizinan, pajak, dan hak atas usaha akan *memberikan rasa aman bagi investor dan meningkatkan kepercayaan* mereka<sup>[15]</sup>. Tanpa hal itu, Aceh akan terus dipandang sebagai daerah berisiko tinggi karena aturan mainnya dianggap bisa berganti sewaktu-waktu.

## Keterbatasan Infrastruktur dan Aksesibilitas

**Infrastruktur** adalah syarat fundamental bagi masuknya investasi ke suatu daerah. Di Aceh, **keterbatasan infrastruktur** diakui sendiri oleh pejabat dan pengamat sebagai salah satu kendala terbesar. “*Keterbatasan infrastruktur menjadi kendala dan menghambat investasi masuk ke Aceh,*” tegas Safuadi, Kepala Perwakilan Kemenkeu Aceh<sup>[16]</sup>. Pernyataan ini menyoroti bahwa banyak calon investor mundur atau berpikir dua kali karena prasarana penunjang bisnis di Aceh dianggap belum memadai.

Apa saja masalah infrastruktur di Aceh? Beberapa di antaranya:

- **Pelabuhan dan Logistik:** Aceh memiliki beberapa pelabuhan, namun kapasitas dan kemampuannya terbatas. Saat ini pelabuhan laut di Aceh hanya mampu disinggahi kapal kargo berkapasitas maksimal ~30 ribu ton, sedangkan standar industri pelayaran modern umumnya

menggunakan kapal 50 ribu ton<sup>[17]</sup>. Artinya, eksportir di Aceh tidak bisa langsung mengirim muatan besar dari pelabuhan lokal dan harus transit ke pelabuhan besar (misal Belawan di Sumut), yang menambah biaya logistik. Kapasitas pelabuhan yang kurang ini jelas mengurangi daya tarik Aceh bagi investasi sektor manufaktur atau perdagangan ekspor.

- **Jaringan Transportasi Darat:** Kondisi jalan di sejumlah wilayah Aceh masih kurang memadai. Jalan antar-kabupaten yang rusak atau sempit menyulitkan distribusi barang dan mobilitas alat berat proyek<sup>[18][19]</sup>. Terbatasnya infrastruktur jalan ini sangat dirasakan investor sektor **perkebunan dan pertambangan** yang perlu mengangkut komoditas dalam volume besar ke pelabuhan atau pasar. Jika akses jalan lambat, biaya operasional meningkat dan waktu tempuh logistik menjadi tidak efisien.
- **Pasokan Listrik dan Energi:** Kapasitas listrik di Aceh masih terbatas dan kualitas pasokan belum stabil di semua area<sup>[20]</sup>. Untuk operasional industri berskala besar (pabrik pengolahan, smelter, dll.), kestabilan listrik sangat krusial. Contohnya, sebuah perusahaan sempat merencanakan proyek pembangunan kilang (refinery) di Aceh, namun menghadapi kendala pasokan energi yang tidak mencukupi<sup>[20]</sup>. Jika investor harus membangun infrastruktur energi sendiri (misal generator besar) tentu menjadi tambahan modal yang tidak sedikit.
- **Fasilitas Pendukung Bisnis Lain:** Aceh juga masih minim **gudang berpendingin (cold storage)** untuk sektor perikanan, padahal kualitas ikan tuna Aceh sebenarnya sangat tinggi<sup>[21]</sup>. Tanpa cold storage memadai, ikan cepat rusak dan nilainya turun di pasar global<sup>[22]</sup>. Demikian pula, fasilitas kawasan industri dan pergudangan modern masih sedikit. Industri keuangan pun terbatas – hanya bank syariah beroperasi di Aceh karena aturan lokal, yang bagi sebagian investor luar menjadi kendala adaptasi tersendiri<sup>[23]</sup>.

Dampak nyata dari infrastruktur lemah ini adalah **biaya tinggi** bagi investor. Mereka harus mengeluarkan cost ekstra untuk transportasi dan utilitas, atau bahkan mengurungkan niat investasi karena prasarana tidak mendukung. “Investor tidak mungkin memperbaiki infrastruktur secara sendiri tanpa dukungan pemerintah daerah,” kata Safuadi<sup>[24][25]</sup>, mengingatkan bahwa tugas penyediaan infrastruktur ada di pundak pemerintah.

Pemerintah Aceh sebenarnya menyadari hal ini dan terus berupaya mengejar ketertinggalan infrastruktur. Pembangunan jalan tol Trans-Sumatra ruas Sigli–Banda Aceh, perluasan pelabuhan, perbaikan bandara, hingga proyek listrik terbaru mulai berjalan. Namun, hasilnya belum dirasakan penuh oleh investor. **Akselerasi pembangunan infrastruktur** harus jadi prioritas jika Aceh ingin menarik proyek skala besar. Seperti diungkapkan perwakilan Kemenkeu Aceh, “*Infrastruktur ini harus jadi perhatian serius pemerintah daerah di Aceh jika ingin mendatangkan investasi*”<sup>[26][27]</sup>. Ketika jalan, pelabuhan, dan listrik sudah memadai, barulah investasi swasta akan datang lebih percaya diri.

## Rendahnya Kepastian Hukum dan Sengketa Lahan

Faktor berikut yang tak kalah penting adalah soal **kepastian hukum**. Investor sangat peduli pada aspek ini, karena menyangkut keamanan jangka panjang modal mereka. Di Aceh, **ketidakjelasan hukum terkait lahan, izin, dan perlindungan investasi** sering disebut sebagai penghambat utama. Banyak proyek besar tersendat akibat sengketa lahan atau aturan hukum yang tumpang tindih.

Contoh nyata, untuk menjalankan proyek skala besar seperti pembangunan kilang minyak atau pembangkit energi, investor memerlukan lahan luas. Proses perizinan lahan di Aceh kerap terhambat

konflik kepemilikan antara pemerintah, masyarakat lokal, dan perusahaan[28]. Sengketa agraria masih lumayan sering terjadi, misalnya klaim tumpang tindih atas tanah adat atau lahan perkebunan antara warga dan pemda. Ketika status hukum tanah tidak jelas, **investor tidak berani memulai konstruksi**, karena berisiko digugat di kemudian hari.

Data Ombudsman RI menunjukkan banyak investor mengeluhkan kurangnya kepastian hukum atas hak tanah di Aceh[28]. Selain itu, aturan turunan seperti izin lingkungan, tata ruang, dan regulasi sektor (kehutanan, pertambangan, dll.) kadang diterapkan tidak konsisten. Perizinan bisa terhenti lama jika ada keberatan dari kelompok masyarakat atau LSM lingkungan, sementara pemerintah daerah tidak memiliki mekanisme penyelesaian cepat.

Hal ini diperparah dengan **penegakan hukum yang lemah** terhadap kontrak atau kesepakatan. Misalnya, ada kasus di mana pemerintah daerah mencabut atau menunda izin proyek secara sepihak karena tekanan kelompok tertentu, walau investor sudah memenuhi syarat. Ketidakpastian seperti ini jelas membuat iklim usaha tidak kondusif. **Investor membutuhkan jaminan perlindungan hukum** bahwa jika mereka mengikuti aturan, investasinya tidak akan diambil alih atau dihentikan tanpa prosedur adil.

Aspek kepastian hukum ini kembali ditegaskan oleh pengusaha dan analis. APINDO sudah mengingatkan bahwa ketidakpastian hukum membuat pengusaha **takut rugi di tengah jalan** akibat regulasi yang bisa berubah semena-mena[13]. Sementara pengamat lokal menyebut “*ketidakjelasan terkait regulasi yang berlaku*” sebagai salah satu hambatan utama di Aceh[5]. Artinya, iklim hukum Aceh dipandang belum ramah investasi.

Untuk memperbaikinya, **pemerintah Aceh perlu memperkuat kepastian hukum** dan penegakan aturan yang konsisten[15]. Semua peraturan terkait investasi – dari hak atas tanah, izin lingkungan, pajak, hingga penyelesaian sengketa – harus diterapkan adil tanpa tebang pilih. Perlindungan hak investor yang jelas (misal melalui perjanjian investasi atau *investment guarantee*) akan memberikan rasa aman. Selain itu, mempercepat reforma agraria dan penataan lahan akan sangat membantu menurunkan risiko sengketa tanah di kemudian hari. Jika kepastian hukum terjamin, kepercayaan investor untuk menanam modal di Aceh pasti meningkat.

## Tata Kelola Pemerintahan yang Lemah dan Praktik Korupsi

Di balik faktor-faktor teknis di atas, ada pula isu fundamental berupa **tata kelola pemerintahan**. Aceh menerima Dana Otonomi Khusus (Otsus) triliunan rupiah setiap tahun dan memiliki anggaran daerah yang besar, namun hasilnya belum optimal bagi pembangunan ekonomi. Banyak pihak menilai problem utamanya bukan kurang dana, melainkan **manajemen dan governance yang lemah**.

Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh, Safuadi, memaparkan bahwa meski Aceh kaya SDA dan mendapat alokasi dana besar, ekonomi Aceh stagnan kalau tata kelolanya tidak diperbaiki[29][30]. Ia menegaskan, faktor manajemen, kualitas SDM aparatur, dan kebijakan strategis yang tepat lebih krusial daripada sekadar adanya sumber daya alam[31]. Dengan kata lain, diperlukan kepemimpinan dan kapasitas birokrasi yang mampu mengolah kekayaan Aceh menjadi kesejahteraan, bukan sebaliknya.

Selama ini, sejumlah program pembangunan di Aceh tidak berdampak luas karena perencanaannya kurang matang dan tidak berbasis data. Akibatnya, puluhan triliun dana Otsus sejak 2008 hingga kini belum berhasil menurunkan kemiskinan Aceh secara signifikan. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran perlu ditingkatkan. Masih adanya laporan proyek mangkrak atau fasilitas yang dibangun tapi tidak terpakai menunjukkan perencanaan yang kurang tepat sasaran. Investor tentu akan skeptis masuk ke lingkungan yang pemerintahannya dianggap kurang efektif.

Lebih parah lagi, persoalan **korupsi** dan **kolusi** turut mencoreng iklim investasi Aceh. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat Aceh – termasuk sektor terkait investasi – mendapatkan sorotan nasional. Sebut saja skandal suap dalam proyek pembangunan *Aceh Marathon* 2018 yang menyeret Gubernur Aceh saat itu, atau dugaan korupsi pada pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe<sup>[32]</sup>. Praktik “uang pelicin” dalam perizinan juga kerap menjadi buah bibir, meski sulit dibuktikan. Hal-hal seperti ini sangat **mengurangi kepercayaan investor**. Mereka khawatir harus berhadapan dengan pungutan liar atau oknum tidak bertanggung jawab bila berinvestasi di Aceh.

Safuadi secara lugas menyatakan bahwa **praktik korupsi** masih menjadi tantangan yang harus dibenahi pemerintah Aceh untuk menggerakkan ekonomi daerah<sup>[7]</sup>. Pernyataan ini mengindikasikan masalah integritas birokrasi yang perlu diperhatikan serius. Dalam indeks persepsi korupsi, Aceh pun cenderung belum menonjol perbaikannya.

Untuk itu, reformasi tata kelola harus berjalan seiring reformasi birokrasi. Pemerintah Aceh perlu membangun *good governance* yang transparan, bersih, dan profesional. Pelayanan publik, termasuk perizinan investasi, harus bebas dari pungli dengan pengawasan ketat (misal melalui sistem **Online Single Submission** yang terintegrasi). **Membangun trust (kepercayaan) investor** menjadi agenda penting<sup>[33]</sup>. Seperti dikatakan Safuadi, iklim investasi Aceh masih kurang menarik karena kendala birokrasi dan regulasi yang tidak kondusif<sup>[34]</sup>. Menciptakan iklim kondusif itu tak lepas dari memperbaiki tata kelola: menutup celah korupsi, memastikan aturan ditegakkan konsisten, dan melibatkan pemangku kepentingan secara terbuka. Ketika pemerintahannya kredibel, investor pun lebih yakin menanam modal.

## Minimnya Diversifikasi Ekonomi: Ketergantungan Migas dan Belanja Pemerintah

Struktur ekonomi Aceh yang kurang beragam juga menjadi alasan mengapa investor belum banyak melirik daerah ini. Selama ini, **perekonomian Aceh sangat ditopang sektor migas dan belanja pemerintah**<sup>[3]</sup>. Kontribusi sektor swasta non-migas relatif kecil. Hal ini menyebabkan resiliensi ekonomi Aceh rendah terhadap guncangan. Ketika harga minyak dunia turun atau ketika belanja pemerintah dikurangi, ekonomi Aceh langsung terpukul karena tidak ada penopang lain. Bagi investor, kondisi ini berarti **pasar lokal Aceh relatif lemah dan berisiko**.

Dengan populasi sekitar 5 juta jiwa, Aceh seharusnya bisa menjadi pasar yang menarik. Namun daya beli masyarakat Aceh tertahan karena angka kemiskinan tinggi. Hingga 2023, Aceh menyandang predikat **provinsi termiskin di Sumatra**<sup>[2]</sup> dengan tingkat kemiskinan di atas 14%. Tingginya kemiskinan dan pengangguran berarti pasar domestik untuk produk/jasa juga kecil. Investor yang membidik konsumen lokal akan berpikir dua kali, karena daya serap pasar Aceh rendah dibanding provinsi lain seperti Sumut atau Riau yang lebih maju ekonominya.

Sementara itu, ketergantungan pada sektor migas membuat ekonomi Aceh kurang berkelanjutan. Ladang gas Arun di Lhokseumawe dulu merupakan penopang utama, tapi kini produksinya menurun drastis (kilang Arun bahkan sudah berubah fungsi jadi import terminal LNG). Cadangan migas Aceh di masa depan perlu eksplorasi baru, namun investor minyak pun mungkin enggan jika iklim investasinya dianggap ribet seperti dijelaskan sebelumnya. Pemerintah Aceh memang terus berupaya menggaet investasi di sektor lain, namun efeknya belum besar.

Untuk menarik investor, Aceh perlu **diversifikasi ekonomi** agar tidak terpaku pada migas. Potensi sektor lain sebenarnya besar: **agribisnis, pariwisata, perikanan, energi terbarukan, industri pengolahan** dan sebagainya. Namun sektor-sektor ini belum berkembang pesat. Pertanian dan perikanan masih didominasi usaha tradisional; **akses pasar kurang, infrastruktur minim** membuat petani-nelayan sulit naik kelas<sup>[35]</sup>. Upaya diversifikasi menghadapi tantangan termasuk *rendahnya keterampilan tenaga kerja lokal dalam industri nontradisional*<sup>[35]</sup>. Artinya, ketika mencoba bangun industri baru (misal manufaktur), sulit mencari tenaga kerja terampil di Aceh karena penduduk terbiasa di sektor tradisional.

Dari sisi investor, mereka tentu lebih tertarik pada daerah yang ekonominya berdenyut dengan aneka sektor karena menunjukkan ekosistem yang hidup. Aceh perlu menunjukkan bahwa di luar migas dan proyek pemerintah, ada aktivitas ekonomi potensial. Misalnya, sektor **perkebunan** Aceh (kopi Gayo, kelapa sawit, kakao, nilam) sangat menjanjikan jika ada investasi hilirisasi. Sayangnya, produk unggulan ini sebagian besar masih dijual mentah, bukan diolah menjadi produk bernilai tambah<sup>[36]</sup>. Kondisi ini membuat Aceh **kehilangan peluang besar** untuk meningkatkan nilai ekspor dan menyerap tenaga kerja lokal<sup>[36]</sup>.

Hal serupa pada komoditas perikanan: tuna Aceh dijual segar atau beku tanpa diolah, rumput laut Aceh belum diindustrikan, dll. **Minimnya industri pengolahan** di Aceh menjadi perhatian serius Safuadi, yang menyoroti kurangnya industri manufaktur pengolah hasil bumi Aceh<sup>[37]</sup>. Dengan kata lain, rantai produksi Aceh masih pendek; investor manufaktur enggan masuk karena ekosistem pendukung (bahan baku terintegrasi, tenaga kerja terampil, infrastruktur) belum terbentuk.

Pemerintah Aceh bersama pemerintah pusat perlu mendorong investasi di sektor-sektor non-migas sebagai prioritas. Program hilirisasi harus dijalankan, misalnya pembangunan pabrik pengolahan CPO menjadi minyak goreng, industri kopi olahan, industri perikanan terpadu, dan sebagainya. Ini sejalan dengan agenda nasional hilirisasi dan akan mendapat dukungan pemerintah pusat. Selain itu, memperkuat **pendidikan vokasi dan pelatihan kerja** bagi warga Aceh penting untuk mencetak SDM yang siap bekerja di industri baru.

Dengan ekonomi yang lebih terdiversifikasi dan tenaga kerja lokal yang kompeten, Aceh bisa tampil lebih menarik di mata investor. Seperti disampaikan dalam sebuah analisis, Aceh harus mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif dan fokus ke diversifikasi ekonomi termasuk energi terbarukan, pariwisata berkelanjutan, dan industri pengolahan<sup>[38]</sup>. Langkah ini akan meningkatkan kemandirian ekonomi Aceh dan membuka lebih banyak lapangan kerja berkelanjutan<sup>[39]</sup>, sekaligus memberi sinyal positif kepada investor bahwa Aceh memiliki berbagai peluang, tidak hanya terbatas di migas.

## Tantangan Sosial dan Budaya (Penerapan Syariat Islam)

Aceh memiliki ciri khas sosial-budaya yang unik dibanding provinsi lain di Indonesia, terutama karena penerapan **Syariat Islam** secara formal. Julukan “Serambi Mekkah” mencerminkan kentalnya nuansa agama dalam kehidupan masyarakat Aceh. Bagi investor, terutama investor asing, aspek sosial budaya ini merupakan hal yang harus dipahami dan dipertimbangkan dengan saksama.

Dari sisi positif, penerapan nilai religius bisa menjadi daya tarik tersendiri seperti konsep **wisata halal** dan ekonomi syariah. Pemerintah Aceh belakangan gencar mempromosikan Aceh sebagai destinasi wisata halal dan pusat ekonomi syariah. Namun di sisi lain, aturan-aturan syariat yang berlaku (misalnya pelarangan alkohol, kewajiban busana muslim, pemisahan gender di tempat tertentu, larangan hiburan malam, dll.) dapat dianggap membatasi ruang gerak bagi sebagian jenis usaha. **Investor di sektor pariwisata** khususnya, perlu menyesuaikan konsep bisnis mereka dengan norma lokal Aceh.

Kasus yang bisa dijadikan pelajaran adalah rencana investasi besar dari Uni Emirat Arab (UEA) untuk membangun resort wisata kelas dunia di Kepulauan Banyak, Aceh Singkil. Nilai investasi fantastis sekitar Rp7,2 triliun ini digadang-gadang akan menyulap Pulau Banyak bak Maladewa versi Aceh<sup>[40]</sup><sup>[41]</sup>. Secara ekonomi, proyek ini menjanjikan keuntungan melimpah bagi daerah dan penduduk setempat. Namun, muncul kekhawatiran di tengah masyarakat lokal mengenai potensi **gesekan budaya** yang dibawanya. Masyarakat Aceh Singkil menyadari masuknya wisatawan mancanegara dalam jumlah besar akan membawa budaya Barat (*westernisasi*) yang bisa bentrok dengan kearifan lokal dan syariat<sup>[41]</sup><sup>[42]</sup>.

Kekhawatiran tersebut antara lain: pengaruh gaya hidup sekuler, pergaulan bebas, cara berpakaian turis yang dianggap terbuka (bikini di pantai, dll.), konsumsi alkohol oleh wisatawan, hingga masuknya nilai-nilai hedonisme<sup>[42]</sup>. Bagi masyarakat Aceh yang religius, hal-hal ini jelas menjadi “*sisi gelap*” yang perlu diantisipasi<sup>[41]</sup>. Kontroversi sosial seperti ini bisa memicu resistensi atau penolakan lokal terhadap investasi yang dianggap *tidak sesuai syariat*.

Kondisi *sosial budaya* Aceh ini tentu diperhatikan oleh investor. **Perusahaan asing harus sensitif terhadap budaya lokal Aceh** agar investasinya diterima masyarakat<sup>[43]</sup>. Misalnya, investor hotel/hospitality di Aceh perlu menerapkan prinsip syariah: menyediakan makanan halal saja, tidak menyajikan alkohol, fasilitas kolam renang atau spa yang terpisah pria-wanita, dan menghormati waktu ibadah. Bagi sebagian investor, penyesuaian ini mungkin dianggap menambah kompleksitas usaha. Ada pula kekhawatiran bahwa tenaga kerja asing atau ekspatriat mereka akan sulit beradaptasi dengan aturan setempat.

Selain itu, Aceh memiliki sejarah konflik panjang (1976-2005) yang meski sudah berakhir damai, menyisakan trauma sosial. Kalangan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah terintegrasi dalam pemerintahan, namun beberapa di antaranya mungkin kurang terbiasa dengan sistem birokrasi modern<sup>[44]</sup>. Situasi keamanan Aceh saat ini sebenarnya kondusif, tapi persepsi luar kadang masih menganggap Aceh “rawan” atau *terlalu konservatif*. Branding semacam ini perlu diubah.

Solusinya, menurut para ahli, adalah melakukan **pendekatan sosial-budaya yang sensitif dan partisipatif**. Pemerintah Aceh perlu melibatkan ulama, tokoh adat, dan masyarakat dalam setiap rencana investasi besar<sup>[45]</sup>. Dengan dialog terbuka, masyarakat dapat memahami manfaat investasi sekaligus menyampaikan kekhawatiran mereka. Pendekatan kultural ini akan mengurangi resistensi sosial dan memastikan proyek investasi tidak merugikan atau menggusur masyarakat lokal<sup>[46]</sup><sup>[47]</sup>. Bagi investor, langkah ini juga positif karena memberi jaminan *social license to operate* – artinya proyek

mereka diterima komunitas.

Aceh sebenarnya bisa memanfaatkan penerapan syariat sebagai **nilai jual** alih-alih hambatan. Misalnya, mengembangkan niche *wisata halal* kelas dunia yang justru menarik segmen wisatawan Muslim global. Ketua Badan Promosi Pariwisata Aceh pernah mengatakan bahwa kolaborasi pariwisata dan ekonomi syariah adalah strategi menarik investor khusus di bidang ini<sup>[48]</sup>. Jadi, tantangan budaya dapat diubah menjadi peluang jika dikelola dengan baik. Yang terpenting, investor harus memastikan operasi bisnisnya selaras dengan kearifan lokal Aceh, sehingga *kondisi aman dapat menjadi nyaman* bagi semua pihak – baik masyarakat maupun penanam modal<sup>[49][50]</sup>.

## Penutup: Upaya Perbaikan dan Harapan Ke Depan

Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa **iklim investasi di Aceh** dipengaruhi banyak faktor multidimensi – mulai dari persoalan birokrasi, kepastian aturan, infrastruktur, hingga sosial budaya. Tidak heran jika sampai sekarang Aceh belum menjadi magnet investasi besar. Namun, kondisi ini bukan tak bisa diubah. Dengan komitmen kuat dan strategi tepat, Aceh memiliki peluang untuk bangkit dan menarik investor, apalagi potensi alam dan geografisnya sangat mendukung.

Sejumlah langkah perbaikan telah dan sedang diupayakan:

- **Reformasi Birokrasi dan Perizinan:** Pemerintah Aceh mulai menyederhanakan proses perizinan melalui layanan terpadu dan digitalisasi. Sistem perizinan **Online Single Submission (OSS)** berbasis risiko yang terintegrasi pusat-daerah diharapkan memangkas prosedur berbelit. Para kepala daerah didorong melakukan *jemput bola* investasi dengan memberikan **pelayanan cepat, transparan, dan bebas pungli**<sup>[10]</sup>. Reformasi birokrasi seperti ini adalah langkah pertama dan paling fundamental<sup>[51]</sup>.
- **Kepastian Hukum dan Regulasi:** Pemerintah Aceh menyusun Qanun (peraturan daerah) terkait investasi yang harmonis dengan regulasi pusat, guna meminimalisir tumpang tindih. Komitmen untuk **tidak mengubah aturan secara tiba-tiba** terus disuarakan. Perlindungan hukum bagi investor, misalnya melalui penerbitan *investment agreement* yang dijamin pemerintah, dapat meningkatkan rasa aman. Menurut pakar, kepastian hukum yang adil dan konsisten akan **meningkatkan kepercayaan investor** untuk berusaha di Aceh<sup>[15]</sup>.
- **Pembangunan Infrastruktur:** Berbagai proyek strategis nasional dilaksanakan di Aceh – mulai dari jaringan tol, pengembangan pelabuhan Krueng Geukueh dan Calang, peningkatan kapasitas Bandara Sultan Iskandar Muda, hingga proyek listrik tenaga gas dan energi terbarukan. Pemerataan infrastruktur ke daerah terpencil juga diupayakan agar investasi tidak hanya terpusat di Banda Aceh atau Lhokseumawe. **Percepatan dan pemerataan infrastruktur** ini akan memangkas biaya logistik, meningkatkan konektivitas, serta menjamin ketersediaan energi bagi industri<sup>[52]</sup>.
- **Diversifikasi Ekonomi dan SDM:** Aceh kini mencoba mengembangkan sektor selain migas, antara lain pariwisata (termasuk wisata halal), industri pengolahan hasil pertanian/perikanan, serta energi hijau. Pemerintah Aceh dengan dukungan pusat telah menawarkan berbagai peluang proyek investasi di sektor tersebut melalui forum bisnis dan pameran investasi. Selain itu, program pendidikan dan pelatihan vokasi diperbanyak, bekerja sama dengan pihak swasta, untuk mencetak **tenaga kerja lokal yang kompeten** di bidang-bidang baru. Diversifikasi ekonomi dan peningkatan kualitas SDM ini bertujuan agar Aceh tidak lagi bergantung pada dana pemerintah,

melainkan punya sektor swasta dinamis yang menyerap tenaga kerja[38].

- **Promosi dan Kolaborasi Investasi:** Aceh aktif mengadakan event seperti **Aceh Investment Forum**, serta ikut serta dalam expo investasi nasional. Badan Penghubung Pemerintah Aceh dan Dinas PMPTSP gencar mempromosikan potensi Aceh ke investor internasional, mulai dari sektor energi, agribisnis, hingga pariwisata. Menurut laporan, Pemerintah Aceh menargetkan realisasi investasi Rp11,13 triliun pada 2024 dengan berbagai insentif dan kolaborasi[53][54]. Meski target 2024 sempat terkendala tahun politik hingga September baru tercapai ~62%[53], optimisme terus dijaga dengan strategi khusus pasca-pemilu. Kolaborasi pemerintah dengan semua pemangku kepentingan – akademisi, pengusaha, komunitas – juga digalakkan untuk memperbaiki iklim investasi bersama-sama.
- **Pendekatan Partisipatif dengan Masyarakat:** Menyadari pentingnya dukungan publik, pemerintah Aceh kini lebih melibatkan ulama dan tokoh masyarakat ketika ada rencana investasi besar. Sosialisasi dilakukan agar masyarakat paham manfaat proyek serta dilibatkan dalam pengambilan keputusan tahap awal[45]. Dengan demikian, muncul rasa memiliki dan mengurangi potensi konflik sosial. Contohnya, dalam rencana pengembangan destinasi wisata baru, pemerintah akan memastikan konsepnya *syariah-compliance* dan memberi ruang bagi pengusaha lokal (UMKM) turut ambil bagian, sehingga masyarakat tidak merasa hanya jadi penonton di daerah sendiri.

Upaya-upaya di atas sejalan dengan rekomendasi para ahli ekonomi daerah. Mereka menekankan perlunya **sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat** untuk memperbaiki iklim investasi Aceh[49]. Pemerintah daerah sebagai fasilitator memperbaiki regulasi dan infrastruktur, sektor swasta membawa modal dan keahlian, sedangkan masyarakat berperan menjaga stabilitas sosial dan menyediakan tenaga kerja[55][56]. Jika ketiga elemen ini dapat bergerak selaras, Aceh bukan tidak mungkin akan mengejar ketertinggalannya.

Sebagai penutup, **Aceh memiliki segala potensi untuk maju** – sumber daya alam yang kaya, posisi strategis di pintu gerbang Selat Malaka, kultur lokal yang unik, dan dukungan kebijakan otonomi khusus. Tantangan besar seperti birokrasi berbelit, ketidakpastian hukum, kurangnya infrastruktur, dan masalah sosial memang ada, tapi **bukan hal yang tak bisa diatasi**[57]. Dengan reformasi yang konsisten dan kesungguhan semua pihak, Aceh dapat bertransformasi menjadi daerah yang ramah investasi. Iklim investasi yang kondusif pada gilirannya akan membuka banyak lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan membawa Aceh bangkit menuju kemandirian ekonomi yang dicita-citakan. **Perdamaian dan stabilitas yang sudah diraih Aceh pasca-konflik harus diiringi dengan kemakmuran**[49] – inilah harapan bersama yang mendorong perbaikan iklim investasi di Aceh ke depan.

## Referensi:

1. Safuadi – Kepala Perwakilan Kemenkeu Aceh, dalam *Popularitas* (Mei 2024), tentang hambatan ekonomi Aceh: infrastruktur minim, perizinan lambat, korupsi[7].
2. Anshori, *Kilas Aceh – Pikiran Rakyat* (Des 2024), data realisasi investasi Aceh 2024 vs target dan penurunan akibat tahun politik[53][54].
3. Hendro Saky, *com* – “Menanti Tangan Dingin Bang Wanto...” (Mei 2024), perbandingan investasi Aceh vs provinsi Sumatra lain[4] dan kondisi ekonomi Aceh (ketergantungan migas, kemiskinan tertinggi)[1][2].

4. Mayjen TNI (Purn) T. Abdul Hafil Fuddin – *AtjehWatch* (Apr 2025), “Aceh Mulia: Kemandirian Ekonomi”, opini yang merinci hambatan investasi (birokrasi, kebijakan tak pasti, infrastruktur, kepastian hukum, sosial budaya)[5][11] serta solusi strategis[51][38].
5. Adli Abdullah – dalam Podcast *SagoeTV* (Des 2024), “Aceh Aman tapi Tak Nyaman?”, analisis 20 tahun pasca damai: investasi mandek karena regulasi tak pasti, birokrasi berbelit, infrastruktur minim[14], rendahnya keterampilan tenaga kerja lokal[35], dan pentingnya kesejahteraan pasca damai[49].
6. *Antara News Aceh* (Mei 2024), “Kemenkeu: Infrastruktur jadi kendala investasi di Aceh” – pernyataan detail Safuadi soal pelabuhan Aceh kapasitas kapal 30 ribu ton vs standar 50 ribu ton [17], kebutuhan dukungan pemda atasi infrastruktur[24], serta terbatasnya jasa keuangan di Aceh [58].
7. Dio Fahmizan – *AcehTrend* (Juni 2021), “Investasi dan Westernisasi di Aceh Singkil” – ulasan rencana investasi UEA di Pulau Banyak Rp7,2 T dan kekhawatiran masyarakat terhadap dampak budaya (westernisasi, sekularisme, alkohol, dll)[41][42].
8. Safuadi – Podcast *SagoeTV* (Nov 2024), penekanan pentingnya trust building bagi investor dan kelemahan tata kelola ekonomi Aceh, termasuk kurangnya industri hilir untuk olah hasil bumi (contoh tuna tanpa cold storage, kopi dijual mentah)[37][36].
9. Data Bank Dunia – *Ease of Doing Business 2020*, dikutip di *AtjehWatch* (2025), lama waktu izin usaha Indonesia rata-rata 62,5 hari vs Singapura 3 hari; di Aceh prosedur kerap tumpang tindih pusat-daerah[6].
10. Laporan Ombudsman RI 2019 dan APINDO 2020 – disebut di *AtjehWatch* (2025), keluhan pelaku usaha atas kebijakan Aceh yang sering berubah dan ketidakpastian hukum (investor takut aturan berubah di tengah jalan)[12][13].

[1] [2] [3] [4] [7] [9] Menanti tangan dingin Bang Wanto bawa Investasi ke Aceh

<https://popularity.com/berita/menanti-tangan-dingin-bang-wanto-bawa-investasi-ke-aceh/>

[5] [6] [8] [10] [11] [12] [13] [15] [19] [20] [28] [38] [39] [43] [45] [46] [47] [51] [52] [55] [56] [57] Aceh Mulia: Upaya, Strategi, dan Investasi untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi – Atjeh Watch

<https://atjehwatch.com/2025/04/22/aceh-mulia-upaya-strategi-dan-investasi-untuk-mewujudkan-kemandirian-ekonomi/>

[14] [35] [44] [49] [50] Refleksi Dua Dekade Damai dan Tsunami Aceh: Aman tapi Tak Nyaman? – SAGOE TV

<https://sagoetv.com/refleksi-dua-dekade-damai-dan-tsunami-aceh-aman-tapi-tak-nyaman/>

[16] [17] [18] [23] [24] [25] [26] [27] [58] Kemenkeu ungkap infrastruktur jadi kendala investasi di Aceh – ANTARA News Aceh

<https://aceh.antaranews.com/berita/359199/kemenkeu-ungkap-infrastruktur-jadi-kendala-investasi-di-aceh>

[21] [22] [29] [30] [31] [33] [34] [36] [37] Tata Kelola dan Struktur Ekonomi Lemah, Penyebab Aceh Sulit Keluar dari Kemiskinan (bagian 1) – SAGOE TV

<https://sagoetv.com/tata-kelola-dan-struktur-ekonomi-lemah-penyebab-aceh-sulit-keluar-dari-kemiskinan/>

[32] Antar Gubernur Irwandi ke Sel KPK, Apa itu Aceh Marathon?

<https://news.detik.com/berita/d-4106729/antar-gubernur-irwandi-ke-sel-kpk-apa-itu-aceh-marathon>

[40] [41] [42] Investasi dan Westernisasi di Aceh Singkil

<https://www.acehtrend.com/news/investasi-dan-westernisasi-di-aceh-singkil/index.html>

[48] Magnet Investasi di Aceh Lewat Sektor Pariwisata Syariah – RRI

<https://rri.co.id/sabang/investasi/1583292/magnet-investasi-di-aceh-lewat-sektor-pariwisata-syariah>

[53] [54] Pemerintah Aceh Optimis Raih Target Investasi Rp11,13 T – Kilas Aceh

<https://bandaaceh.pikiran-rakyat.com/aceh/pr-3368862935/pemerintah-aceh-optimis-raih-target-investasi-rp1113-t>